

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.4.1. Manfaat Teoritis	13
1.4.2. Manfaat Praktis.....	13
1.5. Sistematika Penilaian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Kerangka Teoritis.....	16
2.1.1. Teori Sistem Hukum	18

2.1.2.	Teori Kepastian Hukum.....	20
2.1.3.	Teori Penegakan Hukum.....	24
2.1.4.	Teori Hukum Responsif	26
2.2.	Kerangka Konseptual	29
2.2.1.	Tinjauan tentang Perseroan Terbatas (PT).....	29
2.2.1.1.	Pengertian Perseroan Terbatas (PT).....	29
2.2.1.2.	Ciri-ciri Perseroan Terbatas.....	30
2.2.1.3.	Modal Perseroan Terbatas (PT)	31
2.2.1.4.	Organ Perseroan Terbatas (PT)	33
2.2.2.	Tinjauan tentang Notaris.....	34
2.2.2.1.	Sejarah Notaris di Eropa	34
2.2.2.2.	Sejarah Notaris di Indonesia.....	37
2.2.2.3.	Pengertian, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	43
2.2.2.4.	Pengawasan dan Sanksi Notaris	57
2.2.2.5.	Majelis Pengawas Notaris	59
2.2.2.6.	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris	64
2.2.3.	Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum	71
2.2.3.1.	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	71
2.2.3.2.	Sejarah Perbuatan Melawan Hukum.....	74

2.2.3.3. Perbuatan Melawan Hukum: Konsepsi dan Maknanya	79
2.2.3.4. Unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum	80
BAB III METODE PENELITIAN	86
3.1. Jenis Penelitian.....	86
3.2. Jenis Data.....	87
3.3. Cara Perolehan Data.....	89
3.4. Jenis Pendekatan	90
3.5. Analisis Data.....	91
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	92
4.1. Hasil Penelitian Implementasi Tentang Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Notaris Sebagai Pemohon Dalam Layanan Perseroan Terbatas Pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan HAM RI	92
4.1.1. Sistem Administrasi Badan Hukum	97
4.1.1.1. Pengesahan Badan Hukum Perseroan.....	103
4.1.1.2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ..	104
4.1.1.3. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan	107
4.1.1.4. Permohonan Secara Nonelektronik	108
4.1.2. Peran Notaris Sebagai Pemohon dalam Layanan SABH.....	109

4.1.2.1. Notaris sebagai Perpanjangan Tangan dari Pemerintah	109
4.1.2.2. Notaris sebagai Mitra Pemerintah.....	111
4.1.2.3. Notaris sebagai Pihak Ketiga.....	115
4.2. Analisis Data.....	117
4.2.1. Analisis Atas Pengaturan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemohon Dalam Layanan Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan HAM RI.....	117
4.2.2. Analisis Atas Upaya Pembinaan dan Pencegahan Perbuatan Melawan Hukum yang Mungkin Dilakukan oleh Notaris Sebagai Pemohon Ketika Mengakses Permohonan Dalam Layanan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan HAM RI	121
4.2.2.1. <i>Bareutic Engineering</i> Layanan SABH di Ditjen AHU Kemenkumham RI	122
4.2.2.2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Notaris dalam Layanan SABH	129
BAB V PENUTUP	146
5.1. Kesimpulan	146
5.1.1. Kesimpulan Atas Analisis Pengaturan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemohon Dalam Layanan Perseroan Terbatas pada	

Sistem Administrasi Badan Hukum Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan HAM RI	146
5.1.2. Kesimpulan Atas Upaya Pembinaan dan Pencegahan Perbuatan Melawan Hukum yang Mungkin Dilakukan oleh Notaris Sebagai Pemohon Ketika Mengakses Permohonan Dalam Layanan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum dan HAM RI	148
5.2. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	152